

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrey Sujatmoko. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*. Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Dudung Ahmad Suganda dkk. *Administrasi Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi dalam Pemerintahan Modern*, Cetakan I, 2025.
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cet. 6. Bandung: PT. Rineke Cipta, 2008.
- Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Hasjad dkk. *Hukum Administrasi Negara: Teori, Regulasi dan Praktik Pemerintahan*. Jakarta: CV. Gita Lentera.
- Kadar Pamuji dkk. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: Unsoed Press, 2023.
- Kusumadewi, Yessy, dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.
- Mustomi, Otom, dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Osborne, Stephen P., ed. *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. London: Routledge, 2010.
- Otom Mustomi dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana. 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Abacus, 2006.

Romli SA dkk. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.

Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Situmeang, Sahat Maruli T. *Cyber Law*. Bandung: CV Cakra, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Cet. 2. Disunting oleh Tjun Surjaman. Bandung: Remadja Karya, 1988.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudrajat, Hendra, dkk. *Otonomi Daerah dan Good Governance*. Surabaya: CV Mitra Mandiri Persada, 2024.

Sulaiman dkk. *Perlindungan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Widina Media Utama, Oktober 2025.

Jurnal

Abdul Rauf Alauddin Said. “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat–Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4, Oktober–Desember 2015. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>

Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso. “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia.” *Law Reform*, Vol. 15, No. 1, 2019.

Alfina Damayanti dan Moh. Soleh. “Perlindungan dan Pengembangan Bisnis UMKM Melalui Skema Pemberian Izin PIRT di Desa Jarin Kab.” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 4, Desember 2024. DOI: <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.266>

Amalia, Apri, Sindi, Zarieva Yousif, Malika Ramadhani, Sandi Almirah Putri, Nadia Surati Annisa, dan Daniel Syahputra. “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya.” *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 4, no. 1 (2026): 15–29.

Asri. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal.” *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. IV, No. 2, Agustus 2016.

Damayanti, Alfina, dan Moh. Soleh. “Perlindungan dan Pengembangan Bisnis UMKM Melalui Skema Pemberian Izin PIRT di Desa Jarin Kabupaten

Pamekasan.” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2024): 134–146.

Debora Pasaribu dkk. “Perlindungan Hukum untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat di Masa COVID–19.” *Jurnal ESENSI HUKUM*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021. DOI: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.111>

Dewi Rahmawati dkk. “Pentingnya Izin PIRT Bagi UMKM: Literature Review Article.” *OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, Januari 2024.

Eka Sofiati dkk. “Optimizing B2B E-Commerce Development and Online Marketing with the Linear Sequential Method.” *JAMI: Jurnal Ahli Muda Indonesia*, Vol. 6, No. 1, Juni 2025.

Epriliyana, N. N. (2019). Urgensi izin keamanan pangan (P-IRT) dalam upaya membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan jaringan pemasaran. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 21–31.

Fadilah, Rijal Muhammad, dan Usep Setiawan. “Pendampingan Pembuatan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM Makanan Keripik Kaca di Kampung Tegal Heas, Cihanjavar, Bojong, Purwakarta.”

Faisal, Pupung, dan Purnama Trisnamansyah. “Urgensi Implementasi SNI Produk/Barang dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 1–18.

Frido, S. S., Adawiyah, D. R., & Muhandri, T. (2025). Kajian sistem ketertelusuran dan *recall* pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pangan yang telah memiliki PIRT di Jakarta dan Bogor. *Jurnal Manajemen IKM*, 20(1).

Habibie, Dedi Kusuma, dan Juwita Ovalina Putri Br. Sinaga. “Strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam Menangani Kerentanan Pangan di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 6, no. 2 (2025): 1–12.

Haidar, La Ode Muhamad, dan La Ode Bariun. “Tanggungjawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Informal.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2021): 340–356.

Hari Suriadi dkk. “Desentralisasi dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.” *Menara Ilmu*, Vol. 18, No. 1, Januari 2024.

- Hasanah, Uswatun, Djulaeka, dan Eny Suastuti. "Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Merek terhadap Pelaku Usaha Mikro Desa Bunder Pademawu Pamekasan." *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 9, no. 1 (2023): 22–28.
- Hasni, D., dkk. (2024). Identifikasi bahaya keamanan pangan dan sosialisasi penerapan sanitasi hygiene pada beberapa UMKM pangan di Kota Padang. *Jurnal Pengabdian Mahakarya Masyarakat Indonesia*, 2(2).
- Irda Tania, Fendi Setyawan, dan Yusuf Adiwibowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Pangan Olahan yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya." *JRPP*, Vol. 8, No. 2, 2025.
- Jupri, A., dkk. (2021). Pentingnya izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk meningkatkan pemasaran produk. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4).
- Komang Dita Miranda Prabandari dkk. "Efektivitas Pelaksanaan PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan terhadap Produk Olahan Pangan Industri Rumah Tangga yang Tidak Memiliki SPP-IRT di Kabupaten Banyuwangi."
- Kushandajani. "Makna Otonomi Daerah di Wilayah Laut bagi Masyarakat Pesisir Kota Semarang." Vol. 17, No. 1, Juni 2010.
- Manurung, Grace Jean, Jurniyati Aswad, Keith Xsandrawitz Suharmin, Dini Permata Indah, dan Ivan Darmawan. "Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan di Daerah Surabaya." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 12 (2024): 313–317.
- Marsella Meilie Esther Sunkudo. "Pelaku Usaha yang Mengedarkan Produk Pangan Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau dari Hukum Pidana." *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 3, Mei 2017.
- Marsudi Dedi Putra. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila." *LIK H I T A P R A J N A*, Vol. 23, No. 2, September 2021.
- Mashardianto, Bambang Supeno, dan Adolf Bastian. "Peran Standarisasi Makanan dan Minuman Khas Pekanbaru yang Dipasarkan sebagai Oleh-Oleh di Bandara Sultan Syarif Kasim II." *Jurnal Komunitas Sains Manajemen* 2, no. 1 (2023): 51–58.
- Masriyatun. "Minat Mahasiswa terhadap Layanan Informasi Standardisasi di Perpustakaan Perguruan Tinggi." *Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga: Media Informasi dan Komunikasi Kepustakawanan* 14, no. 2 (2024): 87–96.

- Miranda, Kurnia Dewi. "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan terhadap Produk Olahan Pangan Industri Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Izin Edar PIRT." *Jurnal Amar*.
- Moch Najib Imanullah. "Politik Hukum Ketahanan Pangan Nasional." *Yustisia*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- Mukhafi, Syahrol, Haura Atthahara, dan Kariena Febriantini. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD (Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Terhadap Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Good Governance)." *Community Development Journal* 4, no. 6 (2023): 13514–13517.
- Nainggolan, Rotua, dan Faizah Bafadhal. "Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menjamin Mutu Barang Dan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Perundang-Undangan." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 1 (2021): 144–163.
- Nanda Nirahay Sugeha dkk. "Penerapan Asas *Freies Ermessen* dalam Pengambilan Keputusan oleh Pejabat Publik." *Lex Administratum*, Vol. 13, No. 3, 2025.
- Nanik Prasetyoningsih dan Muchammad Ichsan. "Kajian Yuridis atas Ketentuan Darurat Bencana dalam Konstitusi." *Ius Quia Iustum*, 2024.
- Nasution, Fatmi Utarie, dan Andi Ahmad Rifai. "Regulasi Pemerintah Daerah Jawa Barat Mengenai Kebijakan Ketahanan Pangan dan dalam Perealisasianya untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan Masyarakat Jawa Barat." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 2, no. 2 (2019): 227–248.
- Nasya Handini dkk. "Peran Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal." *JINU*, Vol. 2, No. 5, 2025.
- Njatrijani, Rinitami. "Pengawasan Keamanan Pangan." *Law, Development & Justice Review* 4, no. 1 (2021): 12–28.
- Nofianti, K. A., dkk. (2024). Upaya peningkatan kualitas produk UMKM makanan minuman di Surabaya melalui pelatihan keamanan aditif dan kemasan pangan serta program *self declare halal* menggunakan aplikasi SEHATI. *PengabdianMu*, 9(8).
- Nur Aini dan Rita Dewi Risanty. "Sistem Informasi Purchase Order." *JUST IT*, Vol. 11, No. 3, 2021.
- Prabandari, Komang Dita Miranda, Agnes Pasaribu, dan Rudi Mulyanto. "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019

tentang Keamanan Pangan terhadap Produk Olahan Pangan Industri Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Izin Edar Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Kabupaten Banyuwangi.” *Jurnal Amar*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Puansah, Irman, Anggi Aulia Hutasuhut, Melisa Aulia Koto, Nurhamida Fitri Simatupang, dan Muri Entia Melati Lubis. “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kesehatan Masyarakat.” *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan* 6, no. 2 (2026): 308–316.

Purborini, V. S. (2023). Pentingnya legalitas PIRT dan NIB bagi pelaku usaha kue kering. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 14(1).

Putra, Grahadi Purna, dan Bambang Daud. “Wewenang Pemerintah Daerah dalam Menjamin Keselamatan dan Keamanan Penerbangan serta Pengembangan Bandar Udara.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3, no. 3 (2024): 178–189.

Putri, Audia Mula Anggoro. “Peningkatan Perlindungan Konsumen terhadap Kecantikan Berbahaya di Semarang: Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Peran Pemerintah.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2081–2088.

Putri, Bella Yolmainda Aji, dan Rizka Amelia Azis. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Keamanan dan Mutu Pangan pada Produk Gula Kemasan (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Putussibau).” *Lex Jurnalica* 18, no. 2 (2021): 188–197.

Putu Diah Artaningsih dan I Ketut Westra. “Pengaturan Hukum Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar.” *Kertha Desa*, Vol. 8, No. 11.

Rahmawati, D., dkk. (2024). Pentingnya izin PIRT bagi UMKM: *Literature review article*. *OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 2(1).

Rarsina, Jermias T. U. “Perlindungan Konsumen terhadap Perdagangan Online Produk Pangan Impor yang Tidak Memiliki Izin Edar BPOM.” *Paulus Law Journal*, Vol. 5, No. 1, September 2023.

Retno Anggrina Khalistha Dewi dkk. “Implementasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan IRTP.” *Jurnal Mutu Pangan*, Vol. 7, No. 2, 2020.

Riyanti, Indah. “Desentralisasi dan Hubungan Pusat-Daerah dalam Negara Kesatuan: Studi Perbandingan Indonesia.” *Journal Evidence of Law* 4, no. 3 (2025): 1240–1247.

- Sholihatin Nurul Jannah. "Analisis Open Order dan Close Order terhadap Minat Beli." *Kompetensi*, Vol. 11, No. 2, 2017.
- Steven Jefferson dkk. "Manifestasi UU No. 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan." *SOSTECH*, Vol. 5, No. 5, 2025.
- Suryadi, Narya, Yuniar Rahmatiar, dan Muhamad Abas. "Tinjauan Yuridis terhadap Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Kabupaten Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 7, no. 1 (2023): 70–82.
- Suryani, Ita. "Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Pemasaran Produk dan Potensi Indonesia dalam Upaya Mendukung ASEAN Community 2015 (Studi Social Media Marketing pada Twitter Kemenparekraf RI dan Facebook Disparbud Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Komunikasi* 8, no. 2 (2014): 123–138.
- Tarsisius Murwadi dan Anggi Saraswati. "Peningkatan Kapasitas Bisnis UMK Melalui Sertifikasi Pangan IRTP." *Poros Hukum Padjadjaran*, 2019.
- Tri Aji Nur Dewa Kusuma Wardhana dkk. "Peran Negara dalam Menjamin Hak Bebas dari Kelaparan." 2022.
- Tri Rini Puji Lestari. "Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Perlindungan Konsumen." *Aspirasi*, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Trulline, Putri. "Pemasaran Produk UMKM melalui Media Sosial dan E-Commerce." *Jurnal Manajemen Komunikasi* 5, no. 2 (2021): 259–279. <https://doi.org/10.24198/jmk.v5i2.32746>
- Ulum, A., Nugraha, I. R., Wijayanti, A. E., & Aryanto, B. (2025). Penyuluhan perizinan pangan industri rumah tangga (PIRT) bagi pelaku UMKM Desa Wates. *SANDIMAS: Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2).
- Virginia V. Rumawas dkk. "Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan." *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Yumni, Amalia Zata, Zahra Puspita Eka Putri, Ziofari Baldi Amanta, dan Dian Fitriani Afifah. "Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan Pokok di Kabupaten Sumedang (Studi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang)." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 8, no. 1 (2025): 520–529.
- Yunastiti Purwaningsih. "Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9, No. 1, 2008.

Zahra, Nabila, Ropiah Daulay, dan Ahmad Wahyudi Zein. “Strategi Pemerintah dalam Menjaga Ketahanan Pangan Melalui Kebijakan Publik.” *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 3, no. 3 (2025): 363–375.

Berita

Fauzan, Ahmad Muzdaffar. “Pemerintah Catat Lonjakan Capaian Perizinan UMKM Bukti Kemudahan Usaha.” ANTARA News. 18 Juli 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4975113/pemerintah-catat-lonjakan-capaian-perizinan-umkm-bukti-kemudahan-usaha>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Daerah